KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bamsoet dorong 21 Mei sebagai hari Nelayan Nasional
Tanggal : Jumat, 22 Maret 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bamsoet Dorong 21 Mei Sebagai Hari Nelayan Nasional

KETUA DPR Bambang Soesatyo kembali menegaskan dukungannya agar tanggal 21 Mei ditetapkan sebagai Hari Nelayan Nasional. Menurutnya, penegasan oleh pemerintah diperlukan agar nelayan bisa terayomi, serta menjadi pelengkap visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.

"Ada dua profesi pokok yang menjadi tiang profesi rakyat Indonesia, yaitu petani dan nelayan. Untuk petani sudah ada Hari Pangan. Jika tahun ini pemerintah bisa menetapkan 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional, maka semakin menguatkan posisi nelayan dalam menyangga pembangunan," ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, saat menerima pengurus DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), di Ruang Kerja Ketua DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Bamsoet berharap, saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan yang menuai polemik di kalangan nelayan, posisi HNSI tak sekadar bersikap pro atau kontra. Menurutnya, HNSI harus bisa memberikan solusi atas polemik tersebut.

"Seperti pelarangan penggunaan cantrang, serta larangan penangkapan dan pengeluaran lobster. Kedua kebijakan tersebut punya maksud baik, namun implementasinya di lapangan menyebabkan polemik berkepanjangan. HNSI jangan terjebak pada pro dan kontra, HNSI harus bisa memberikan masukan dan kritik yang solutif," tegas Bamsoet.

Ketua Umum HNSI Mayjen TNI Marinir (purn) Yusuf Solihin menjelaskan, HNSI selalu siap bekerjasama dengan pemerintah dan DPR. Dalam pelarangan cantrang, misalnya, berkat perjuangan HNSI akhirnya KKP mencabut larangan tersebut. Dengan demikian, nelayan bisa kembali melaut dan menafkahi keluarganya.

Selain itu, sambung dia, HNSI juga mendorong KKP menyiapkan alat tangkap pengganti cantrang yang lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, para nelayan memiliki kesiapan jika cantrang dilarang.

"Kami memahami tujuan baik pemerintah, menjaga agar lobster, kepiting, dan rajungan tidak punah. Karena itu, sebaiknya yang diatur adalah ketentuan beratnya dan jantan atau betinanya, mana yang boleh ditangkap dan tidak. Jangan dilarang tangkap sama sekali," urainya.

Yusuf menambahkan, pelarangan tersebut juga membuka ruang pada jaringan mafia untuk menyelundupkannya ke luar negeri. "Akhirnya, nelayan kita jugalah yang rugi," tandasnya.

Selain Ketua Umum DPP HNSI, sejumlah pengurus turut hadir, antara lain Anton Leonard (Sekretaris Jenderal), Khrisna Kamil (Bendahara Umum), Secarpiandy (Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan), Fredy Aronggear (Departemen Penyerasian Antar Wilayah), Bustami Mahyudin (Departemen Perikanan Tangkap), dan Rico Menayang (Departemen Pengembangan Bisnis Perikanan). Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet juga resmi diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat HNSI. ■ ONI